

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajiian Teorii

1. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Multikultural

a. Pengertian Pendidikan

Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak yang harus di penuhi sepanjang hayat tanpa pendidikan, mustahil manusia atau kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Menurut Dhiyarkara, menyebutkan bahwa “pendidikan ialah cara untuk manusia agar memanusikan manusia dan pengangkatan derajat manusia ke taraf yang lebih baik maka itulah yang disebut dengan mendidik” berdasarkan Ditjen Dikti, (1983/1984:19). Dalam *Dictionary Of Education* dinyatakan bahwa pendidikan ialah proses dalam mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah laku manusia ke taraf yang lebih baik agar manusia dapat hidup dengan baik dimanapun baik lingkungan masyarakat lingkungan sekolah dll sehingga ia dapat memperoleh dan mengalami pengalaman yang baik.

Dari beberapa definisi yang dibahas di atas penulis menyatakan bahwa pendidikan dapat di artikan sebagai berikut:

- 1) proses pertumbuhan kembangan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- 2) pengarahan yang di berikan kepada anak-anak pada masa pertumbuhan nya menjadi dewasa .
- 3) Suatu usaha untuk menciptakan keadaan atau situasi tertentu yang di kehendaki oleh masyarakat.
- 4) Suatu cara untuk membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan anak anak menjadi dewasa

b. Pengertian Multikultural

Arti dari kata multikultural berarti sebagai kebudayaan .secara epistemologis multikultural berasal dari kata multi (banyak), Kultur (budaya/kebiasaan) dan Isme (aliran) sedangkan berdasarkan hakikatnya menurut peneliti multikultural ialah suatu bentuk keberagaman atau perbedaan yang telah di ciptakan oleh yang maha pencipta sedangkan menurut . Mahfud (2016 , hlm. 75) menjelaskan tentang pengertian kebudayaan / multikulturalisme sebagai berikut :

“multikulturalisme Itu adalah sebuah ideology dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan maka konsep kebudayaan harus di lihat dari perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia”.

Menurut Suparlan dalam Mahfud (2016, hlm. 76) Melihat dalam perspektif Tersebut, “kebudayaan adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus di perhatikan bersama menyangkut kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu bekerja melalui pranata pranata sosial.”.

Kondisi multikultural bangsa ini di ibaratkan sebagai pisau bermata ganda: disatu sisi merupakan modalilitas yang bisa menghasilkan energy positif tetapi di lain sisi manakala keanekaragaman tersebut tidak bisa di kelola dengan baik ia bisa menjadi ledakan destruktif yang bisa menghancurkan struktur pilar pilar kebangsaan. Sejarah peradaban bangsa besar seperti Amerika dan Kanada misalnya adalah sejarah keberhasilan mengelola dan me-manage multikulturalisme kebangsaan, Konsep *melting pot society* yang di dalam nya mengadaikan terjadinya peleburan elemen sosial budaya kedalam sebuah campuran homogen (*homogen amalgama*) menjadi konseptual praktis dalam membangun masyarakat multikultural itu.

c. Sejarah Multikulturalisme Di Indonesia

Secara historis, sejak runtuhnya era kepresidenan Soehato dari kekuasaaannya yang kemudian diikuti dengan era Reformasi . Kebudayaan Indonesa cenderung mengalami penyimpangan. Menurut Azyu Mardi Azra dalam Mahfud (2016 hlm.81), Mengatakan bahwa “krisis moneter, ekonomi dan politic

pada awalnya ada pada saat 1997 yang telah menyebabkan terjadinya krisis sosiokultural di dalam kehidupan bermasyarakat dan jalinan masyarakat (*Fabric of society*) yang ternodai dengan diakibatkan oleh adanya krisis moneter yang terjadi dan menyerang masyarakat”.

Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagaimana yang di ungkapkan Hefner dalam Mahfud (2016 hlm.83) “sangatlah mencolok terdapat hanya beberapa wilayah di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu”. Karena itulah dalam teori politik barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940 –an, wilayah ini khususnya Indonesia di pandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/ plural” (prural society) yang di perkenalkan dunia barat oleh JS Furnivall (1944, 1948). Furnivall dalam Mahfud (2016 hlm. 84) menjelaskan bahwa “ masyarakat prular adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu inis politik tunggal”. Teori Furnivall itu banyak berkaitan dengan realitas politik Eropa yang relative “homogen”. Tetapi sangat di warnai etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial kultural, politik, dan pengalaman eropa, Furnivall memandang masyarakat prural Asia Tenggara, khususnya Indonesia akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi prularis yang

Seiring berakhirnya sentralisme kekuasaan pada masa orde baru memaksakan “ mono kultural”, monokulturalitas keseragaman, muncul reaksi balik yang bukan tidak mengandung sejumlah implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia pada hakikatnya multicultural berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan Pemerintah terjadi pula peningkatan gejala “Provinsiliasme”

Parekh dalam Mahfud (2016 hlm.86) bahwa “ *just a society with several religion or league is multi religious or multi lingual, a society containing several culture is multicultural*” karena itu sebagaimana yang di rumuskan Parekh, Bahwa : “ *a multicultural society then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none then less distinct conceptions of the world, system of meaning, values, form of social organization, histories, customs and practies*”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa multikulturalisme merupakan salah satu cara untuk mempersatukan masyarakat yang beragam dan berbeda baik dalam segi ras, budaya, agama dan suku sehingga dengan adanya ultikulturalisme di harapkan seluruh elemen masyarakat dapat hidup dengan baik dan nyaman di lingkungan mereka tinggal. Baik golongan mayoritas maupun minoritas. Multikulturalisme sendiri bukanlah sebuah wacana atau gambaran melainkan multikulturalisme ialah ideology yang harus ditetapkan dan di terapkan untuk terciptanya masyarakat yang demokrasi, sadar akan HAM, dan hidup sejahtera di tengah-tengah masyarakat.

d. Pengertian Pendidikan Multicultural

Sebagai pembahasan baru banyak pendapat mengenai pendidikan multikultural menurut pendapat Andersen dan Cusher yang di kutip oleh Mahfud (2016 hlm.175), Bahwa “Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan” kemudian menurut Banks dalam Mahfud (2016 hlm.175) Mendefinisikan "Pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color* artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (Anugerah Tuhan). kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan semangat egaliter. Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin El Mahady (2004) berapa berpendapat berpendapat, “secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan masyarakat global”.

Menurut Paulo Freire (pakar pendidikan kebebasan) dalam bukunya yang berjudul “ Politik pendidikan “, bahwa pendidikan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial budaya. Pendidikan menurutnya harus menciptakan tatanan masyarakat yang hanya menanggung prestise sosial akibat kekayaan dan kemakmuran yang di alaminya.

Pendidikan multicultural merupakan respon dari berkembangnya keanekaragaman populasi yang ada di sekolah, bagaimana tuntutan persamaan hak untuk belajar bagi setiap orang. Di sisi lain pendidikan multicultural ialah

perkembangan dari kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memandang sejarah dan prestasi terhadap orang-orang. Sedangkan secara luas pendidikan multicultural mencakup aspek penting untuk siswa tanpa harus membeda-bedakan kelompok seperti: jenis kelamin, etnic, ras, budaya, dan Agama

e. Dimensi Pendidikan Multikultural

James bank dalam Mahfud, (2016, hlm.177) mengatakan , bahwa pembelajaran multicultural memiliki sebagian dimensi seperti :

- 1) *Content integration*, ialah dengancara mengintegrasikan setiap budaya maupun kelompok lalu menilustrasikannya kedalam sebuah konsep dan menjadikanya teori didalam proses pembelajaran
- 2) *the knowledge contruction process*, yaitu mengajak siswa untuk memahi peran budaya dalam sebuah mata pelajaran
- 3) *an equity paedagogy* ialah dengan cara memakai metode pembelajaran bagi siswa dan mempersiapkan cara dan proses belajar peserta didik dalam upaya memfasilitasi prestasi akademik maupun non akademik siswa.
- 4) *prejudice reduction*, ialah mengidentifikasi dan memilah karakteristik ras untuk mempersiapkan metode pembelajaran kemudian mempersiapkan siswa dalam interaksi dengan seluruh staff dan warga sekolah yang berbeda etnis untuk memimplemtasikan nilai toleransi.

Dalam kegiatan pembelajaran, objek dari pendidikan adalah peserta didik dan sekaligus subjek pendidikan. Oleh sebab itu para pendidik dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik harus di lengkapi pemahaman tentang ciri ciri umum peseta didik :

- 1) Pesetadidik dalam keadaan sadar dan mempunyai daya .
- 2) Berkeinginan menjadi dewasa
- 3) Mempunyai latar belakang yang beragam

f. Ciri Ciri Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan multicultural bisaa digunakan pada tingkat beragam dan dapat menggambarkan isu-isu dan masalah pendidikan yang berkaitan dengan multicultural yang mencakup tentang pertimbangan terhadap kebijakan kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multicultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan haruslah mencakup subjek subjek seperti Toleransi, perbedan pernakan etnokultural dan agama, Bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan

universal dan subjek subjek yang relevean lainnya. Dalam konteks teoritis, belajar dari model model pendidikan multicultural yang pernah di kembangkan Negara Negara maju ada beberapa pendekatan dalam pendidikan multikulturalisme yaitu : pertama pendidikan tentang perbedaan kebudayaan, kedua, pendidikan pemahaman kebudayaan. ketiga, pendidikan tentang plurasisme keempat pendidikan dwibudaya dan kelima pendidikan moral

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, seperti kita ketahui Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.667 pulau besar dan pulau kecil. Dengan jumlah pulau sebnayk itu maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan perlu di garis bawahahi bahwa perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan multikultikuturalisme ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Bertujuan untuk membuat manusia yang berbudaya akan menciptakan masyarakat yang berbudaya (peradaban).
- 2) Mengajarkan nilai nilai luhur tentang kemanusiaan, nilai nilai kebangsaan, dan nilai nilai kelompok (etnis).
- 3) Metodenya demokratis, yang menghargai aspek aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalisme).
- 4) Evaluasi penilaian dinilai dalam aspek tingkah laku peserta didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan respon terhadap budaya lain.

Dalam hal ini Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat yang kemajemukan baik dalam segi etnis, buadaya, agama, ras, gender, dan berbagai macam suku oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mengerti arti multicultural dan perlu mendapatkan pendidikan multicultural agar dapat terus hidup dan berdampingan Pendidikan multicultural ini memiliki tujuan yang sama dan sering dituang di sekolah pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang di singkat PPKn. Oleh karena itu penulis mengaitkan penelitain pendidikan multicultural dengan mata pelajaran PPKn.

2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang dibuat untuk membentuk peserta didik agar dapat menyesuaikan baik dengan lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar serta agar peserta didik bisa sebaik mungkin menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di kehidupan sehari-hari dan menjadi warga Negara yang baik dan taat akan aturan dan hukum yang berlaku .

Sedangkan berdasarkan pendapat Kerr dalam Winatapura dan Budimansyah, (2007, hlm. 4) , *“citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process”* Dari definisi Kerr tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas yang mencakup proses mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Sedangkan menurut Wadu B, Darma P, dan Ladamay I (2019, hlm 68) mengatakan “bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ialah pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral baik”. Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan diri pada bidang kajian ideology, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia . agar bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik agar mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas baik dan mengamalkan NKRI Selain itu matapelajaran PPKn juga di harapkan agar dapat mencetak peserta didik yang dapat menjaga, mempertahankan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan yang ada di Negara ini Walaupun kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, etnik, budaya, agama, suku, dan bahasa.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan umumnya ialah untuk membentuk dan mencetak warga negara yang baik yang taat akan hukum dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam penjelasan UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Menyatakan Bahwa “PPKn di maksudkan Untuk Memebentuk Peserta didik menjdi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air”. Yang di maksud Pendidikan Kewarganegaraan Menurut UU tersebut ialah bahwa PPKn di bagi menjadi 2 kompetensi yaitu rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme). Sedangkan menurut Maftuh B (2008 hlm.138) menurutnya “Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu harus lebih lengkap dan komperhensif agar sesuai dengan tujuan masa kini” menurut Edward dalam Maftuh B (2008, hlm.138) beliau berpendapat bahwa”Tujuan PPKn ialah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu untuk menggali pengetahuan, membuat keputusan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dari beberapa terori di atas maka tujuan PPKn memuat beberapa nilai-nilai Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pendidikn Kewarganegaraan harus memuat beberapa komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang masing-masing

c. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Multikultural

Menurut Fatimah, Kiptiah, & Fajrin, (2014) Dalam menjalankan pembelajaran Pendidikan kewarganegraan yang di intergrasikan dengan pendidikan multikultural maka harus di persiapkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rancangan pembelajaran PKn yang bernuansa multikultural, dapat dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (a) Analisis Isi, (b) Analisis latar kultural, (c) Pemetaan materi, (d) Pengorganisasian materi pembelajaran PKn, (e) Menuangkan dalam format pembelajaran.

- 2) Pada tahap ini silabus, RPP, dan bahan ajar disusun. Baik silabus, RPP, dan bahan ajar dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi/berwawasan dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan multikultural adalah dengan mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, disadarinya pentingnya nilai-nilai yang telah diintegrasikan.
- 3) Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi hal-hal seperti: ketentuan tentang rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, dan pengelolaan kelas. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran meliputi: kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai budaya yang ditargetkan dan telah diintegrasikan dengan nilai-nilai multikultural. Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar seorang guru harus bersikap adil dalam bertindak, dalam memberi nilai dan harus menjadi orang yang bisa menjadi patokan untuk berbuat hal-hal yang baik.
- 4) Evaluasi Pembelajaran PKn yang mengandung Nilai-Nilai Multikultural. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan prinsip-prinsip: 1. Sahih, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan. 2. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 3. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan agama, suku, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari proses kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian oleh pendidik mencakup aspek kompetensi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Radikalisme

a. Pengertian Radikalisme

Menurut KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia). Radikalisme diartikan sebagai “Paham atau aliran menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis”. Dalam beberapa kamus, radikal meruakan kata sifat yang berarti aksi yang mencolok untuk menyerukan paham ekstrem agar dapat diikuti oleh banyak orang atau pengikutnya. Sementara itu menurut (Kusumaningrum, 2015). Mendefinisikan bahwa “radikalisme ialah ideologi yang mempercayai perubahankeseluruhan yang hanya bisa di lakukan dengan cararadikal atau kekerasan bukan dengan cara evolusioner atau damai”.

Radikal diartikan sebagai mengakar dalam mencari kebenaran. Namun, akan berbeda jika ditambahkan “isme” dalam kata radikalisme, yang berarti merujuk pada suatu paham atau ideologi yang radikal. Sehingga makna radikal telah berubah khususnya dalam perspektif politik. Radikalisme merupakan paham atau ideologi yang mengakar dalam ide-ide politiknya untuk melakukan perubahan atas kondisi yang ada baik ekonomi, sosial ataupun politik. (Saihu dan Marsiti, 2019).

Namun pada zaman colonial belanda kata radikal di maknai positif. Menurut Adnan Buyung Nasution di Utrecht Belanda pada saat 1918 ia menyebutkan bahwa “ di fase sebelum kemerdekaan dibentukapayang di sebut sebagai *radicale cocentratie* terdiri dari Boedi Oetomo, serikat islam dan lain-lain”. Tujuan di bentuknya kelompok-kelompok ini ialah untuk membentuk dan mengkontruksikan parlemen yang tersisri dari perwakilan yang dipilih dari kalangan rakyat. Dalam pandangan lain juga disebut bahwa “seseorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan perubahan cepat dan mendasar dalam hokum dan metode metode pemerintahan” (*A Radical is a person who the favors rapid and sweeping changes in laws and methods of Government*) berpijak pada pemahaman ini, radikalisme bisa di artikan sebgai sebuah sikap yang mengharapkan revolusi atau perubahan dari ststus quo dengan jalan yang tidak benar seperti menghancurkan kedaan dengan pemikiran yang baru.

Rubaidi, (2011) Menjelaskan bahwa “radikalisme dalam lingkup keagamaan merupakan perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai, yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama dalam beberapa tahun kebelakang radikalisme menjadi permasalahan di dunia karena radikalisme dianggap sebagai awal mula dari datangnya terorisme yang dapat mengganggu kestabilan dunia. Namun dalam banyak kasus agama tidak menjadi sumber radikalisme itu tersendiri, akan tetapi agama di jadikan alat mobilitas dalam sebuah gerakan radikal, sebab agama dapat di gunakan untuk menggerakkan sentiment masyarakat dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Seperti masalah ketidakadilan, penindasan, dan lain lain.

b. Periodisasi Radikalisme

Radikalisme berdasarkan historis mulanya berkembang pada saat revolusi Perancis di bawah politik sayap kiri. Berdasarkan hal tersebut seiring perkembangannya radikalisme bukan lagi berada di sayap kiri maupun kanan politik akan tetapi radikalisme menjamur kedalam bidang keagamaan yang telah menemukan momentum pada saat pertengahan tahun 1980-an saat Agama mengalami sebuah kebangkitan (*religious revival*) yang menentang adanya modernism dan sekuler.

Menurut Rapopot David (2006) Bahwa Gerakan Radikalisme di Dunia mempunyai tahap periodisasi sebagai berikut :

- 1) *Anarchist Wave* (Gelombang Anarkis) yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 1880-1920 M. dimulai dari rusia dan terus berkembang hingga beberapa tahun kemudian. strategi utama mereka ialah melakukan penyerangan terhadap pejabat pemerintah. Pada tanggal 24 januari 1878. Vera zulich mencedarai seorang komandan polisi yang mengenai seorang tahanan politik. Pada tahun 1879 di rusia juga muncul gerakan radikal teroris Narodya Volya. Kelompok I ni mempraktekan terorisme sebagai cara untuk mengambil perhatian masyarakat. Salah satu cara aksi mereka ialah penggulingan dan pembunuhan Tsar Rusia Alexander II tahun 1881.

- 2) *Anticolonial Wave* (Gelombang Anti Penjajahan) terjadi dalam kurun waktu 1920-1960 M. gerakan ini di latar belakang oleh praktek praktek penjajahan oleh Negara Negara pemenang perang dunia ke-I. Perjanjian perdamaian Versailles menandai berakhirnya PD-I. implemntasi perjanjian tersebut adalah, Negara Negara pemenang perang dapat menguasai wilayah Negara yang kalah perang. Hal ini memicu munculnya gerakan radikal yang menuntut kemerdekaan, dengan aksi gerilyawan atau perjuangan pembebasan dimana mana seperti : Alzajair, Irlandia, Vietnam, Indonesia, dan Yaman.
- 3) *New left Wave* (Gelombang Sayap Kiri) berlangsung dalam kurun waktu 1960-1980, di tandai dengan perang antara Amerika dan Vietnam. Pada kurun waktu itu banyak lahir organisasi organisasi radikal ., seperti German red Army, Faction , dan Italian red Brigades dan lain-lain.
- 4) *Religion Wave* (Gelombang Radikalis Religious) sejak 1979-sekarang . pengertiannya radikal yang menggunakan agama sebagai alat untuk memotivasi , seperti revolusi islam iran pada tahun 1979. Kekalahan rusia menghadapi gerakan radikal afganistan 1989, dan akhirnya uni soviet benar benar runtuh dan Negara Negara satelit nya melepaskan diri, seperti Uzbekistan, kazakhstan, dan lain lain. Gerakan ini terus berkembang sampai sekarang .

Adapun di Indonesia, dalam ranah historis munculnya islam yang di bawa para wali di masa lalu terbukti dapat hidup dengan damai dan berdampingan dengan umat lain pada masa itu. Kedamaian ini kemudian tereduksi seiring tuntutan zaman dan perubahan sosial. Hal ini muncul tidak lepas dari akserelatifnya dan berkembangnya komunitas komunitas islam di tanah air di tandai dengan munculnya sakte sakte atau aliran islam yang terus bermunculan. Islam mengalami dimamisasi sejalan dengan latar belakang kultur daerah pemeluknya. Kemunculan islam radikal di Indonesia merupakan sebuah bagian dari tatanan perubahan sosial dan politik. Khusus nya pasca kehadiran orang-orang hadramaut yang membawa ideologi ideologi baru ke tanah air. Ideology atau “mazhab baru” yang mereka bawa lebih keras dan tidak mengenal tolreansi, sebab banyak di pengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideology resmi Pemerintahan Arab Saudi, hal ini paradoksal dengan realitas

sebelumnya yang hampir semua para pendatang Arab yang datang ke Asia Tenggara adalah penganut mazhab imam Syafi'i yang mengajarkan toleransi, moderasi, ramah dan bisa menghargai perbedaan.

Semangat radikalisme tidak terlepas dari permasalahan permasalahan politik (*political problem*) yang sering kali timbul dan menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama di Indonesia yang berbagai macam ragamnya. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya semakin besar dan meningkat.

c. Motivasi Dan Aspek-Aspek Radikalisme

Menurut U.S Army Training and Doctrine Command (2007) ada beberapa motivasi dan aspek terjadinya gerakan radikalisme adalah sebagai berikut :

- 1) *Separatism*. yaitu motivasi dan pergerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok guna memperoleh pengakuan akan kemerdekaan, kekuasaan, politik, dan kebebasan dalam beragama..
- 2) *Etnosentrisme*. ialah motivasi atau gerakan yang dilandaskan pada kepercayaan maupun keyakinan yang ia anut bahwa akan adanya pengolongan suatu ras yang membuat suatu golongan merasa lebih tinggi derajatnya dari golongan rendah. Tujuan terot tersebut ialah untuk mendapatkan pengakuan dari golongan lain.
- 3) *Revolusiner*, gerakan yang termotivasi untuk melakukan perubahan dan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa, baik perubahan politik maupun struktur social, seperti gerakan gerakan yang di motivasi oleh politik dan idealism komunis.

Dan berikut ini merupakan hal hal yang menjadi akar seperti:

- 1) Pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran yang ekstrim.
- 2) Kekaguman akan kesuperioritas diri maupun kelompok.
- 3) Fanatisme golongan, mazhab atau faham yang berlebihan.
- 4) Merasa benar sendiri, orang lain yang tidak sama dengannya pasti di pandang salah.
- 5) Sistem pendidikan agama yang kurang benar, seperti system pendidikan indoktriner.
- 6) Karena adanya desain atau rekayasa kepentingan kelompok kelompok.

d. Bentuk Radikalism di Dalam Dunia Pendidikan

Radikalisme bisa dibidang sebagai suatu paham yang menjadi landasan terhadap suatu perbuatan maupun tindakan Kriminal atau teror. Namun pada mulanya radikalisme di anggap sebagai sesuatu yang positif. Namun di dalam dunia pendidikan juga tidak lepas dari yang namanya radikalisme atau tindakan tindakan yang menggunakan cara kekerasan yang menjadikan tujuan pembelajaran tidak tercapai dan dilaksanakan dengan baik . Radikalisme bisa juga muncul dari berbagai element baik dalam pendidikan maupun bidang lainnya.. kejadian radikalsime di kalangan dunia pendidikan dapat bermula dari berbagai aspek seperti, Guru ke Siswa maupun siswa ke guru dan baik dari segi lingkungan pendidikan.

Menurut Menteri Agama RI Bapak Fachrul Razi beliau mengutip hasil survey Lembaga kajian islam dan Perdamaian (Lakip). Berdasarkan hasil survei tersebut diketahui bahwa 52% peserta didik setuju dengan adanya radikalisme. Survei tersebut pernah di publikasikan pada tahun 2010 s/d 2011. Tingginya tingkat persetujuan dari peserta didik terhadap aksi dan perbuatan radikal ini sangat mengkhawatirkan bagi penerus bangsa ini. Selain itu menurut hasil survey dan penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang di muat di wabstite Lipi.go.id yang di unggah pada 26 Februari 2016 berdasarkan hasil riset tersebut menyatakan bahwa paham radikalsime sudah masuk dan menyerang di lingkungan sekolah. Dari data tersebut 21% guru dan peserta didik berpendapat bahwa Pancasila tidak lagi relevan diterapkan di Negara ini karena 84,8 % Peserta didik dan 76,2% guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam selain itu 52,3% peserta didik sepakat dengan solidaritas dengan menggunakan kekerasan. menurut bali post mengungkapkan bahwa dalam periode 2010 sampai 2014 telah tercatat tindakan seperti radikalisme yang terjadi dilembaga pendidkn 21.689.797 kasus

Bentuk radikalisme dalam dunia pendidikan dalam dunia pendidkn tidak selurunya berbentuk kejahatan fisik tapi juga dapat di lakukan melalui baik melalui lisan, tindakan atau skiap yang dapat membuat potensi kekerasan yang jauh dari norma-norma berlaku dalam dunia pendidikan dari perbuatan tersebut dapat mengganggu aktivitas belajar menjadi tidak menyenangkan dan akan jauh dari tujuan pembelajaran. Menurut Muchith Saekan, (2016, hlm.174) menyebutkan bahwa “sekolah memiliki fungsi yang futrah yaitu membimbing, mengajarkan dan

mengarahkan siswa ke jalan yang benar kini bergeser menjadi sesuatu yang menakutkan dan menegarkan bagi siswa. Mengapa begitu. Karena orientasi pendidikan sudah mulai sudah berkurang yang tadinya menjadi proses penyadaran menjadi proses pemaksaan pemahaman dalam mengetahui dan memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan”. Perubahan situasi di lingkungan pendidikan ini menciptakan sebuah perubahan yang berorientasi begitu saja. Perubahan tersebut merupakan sesuatu yang bersumber dari perkembangan budaya dan dinamika budaya yang ada dalam masyarakat. Yang artinya elemen-elemen di dalam pendidikan belum mengambil nilai-nilai yang baik dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 pasal 39 ayat 1-5 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru minimal memperoleh tiga macam perlindungan yaitu: pertama perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja. Perlindungan hukum artinya guru mendapatkan hak untuk terlindungi dari segala macam tindakan kekerasan, intimidasi dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan profesi ialah hak yang diberikan agar melindungi profesi dan jaminan hidup yang layak. Sedangkan perlindungan kesehatan yaitu berbagai perlindungan dari caman kerja dan lainnya.

e. Langkah Untuk Meminimalisir Tindakan Radikalisme Di Dalam Dunia Pendidikan.

Radikalisme dapat menyerang semua kalangan dan tempo dan waktu kapan saja Tidak memandang apakah itu anak kecil, maupun orang dewasa, tidak memandang miskin atau kaya. Radikalisme terjadi karena adanya pemikiran yang kecil terhadap sesuatu fenomena. Oleh karena itu radikalisme bisa di minimalisir melalui pembinaan karakter yang baik dan berbudaya dan mengubah cara pandangan seseorang terhadap perbedaan dan keberagaman.

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk meminimalisir radikalisme di dunia pendidikan terutama sekolah. Menurut Muchith Saekan (2016) “Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir ialah dengan meningkatkan pola jaringan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Pembinaan bukan hanya dilingkungan

sekolah akan tetapi peran orang tua dan lingkungan juga harus di aktifkan agar simbang antara lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar”.

Berdasarkan pendapat Kepala Biro penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Setyo, menyatakan bahwa kelompok anarko dan sindikalisme yang telah melakukan tindakan yang memacing kerusuhan dalam peringatan hari buruh pada 1 mei 2019 di sejumlah kota di Indonesia ialah perbuatan dari sejumlah pelajar SMP sampai dengan Mahasiswa. Yang sebelumnya kelompok tersebut juga membuat kerusuhan didalam rangkaian hari buruh/ mayday di Bandung pada hari rabu (1/5/2019) kelompok tersebut juga melakukan aksi di kota lainnya. Berdasarkan hasil analisa rata-rata usia pelaku tersebut ialah usia berkisar SMP sampai dengan bangku kuliah. Ujar Brigjen Dedy di kantor Mabes Polri Jakarta (3/5/2019)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat berpendapat bahwa pesertadidik rentang untuk terpapar faham radikalisme karena usia pelajar atau peserta didik adalah usia dimana mereka sedang mencari jati diri, belum bisa membendung emosi dalam diri mereka, dan senang untuk mengenal hal hal baru. tentu saja hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk kaum kaum radikal untuk menyebarkan faham radikalisme

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk menambah informasi sebagai memperkaya bahan kajian bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

1. Judul : “Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan multikultural Dalam Proses Pembelajaran Di Smp 6 Banjarmasin”

Penulis : Fatimaah, Mariaatul Kiptiaah Dan Nur Fajarin. dari PPKn Universitas Lambung Mangkurat

Tempat penelitian : Penelitian tersebut di lakukan di SMPN 6 Banjarmasin.

Hasil penelitian : Untuk mengetahui Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Yang dimana dalam penelitian tersebut di gunakan metode Kualitatif. Dalam penelitian tersebut dapat di ketahui :

- a. Perencanaan dalam proses pembelajarn PPKn telah mengandung nilai-nilai multikultural di SMP Negeri 6 Banjarmasin.
- b. Pelaksanaan dalam proses proses pembelajarn PPKn telah mengandung nilai nilai multikultural di SMP Negeri 6 Banjarmasin
- c. Evaluasi Proses pembelajarn PPKN yang telah menerapkan Nilai-Nilai Multikultural.

2. Judul : “Persepsi peserta didik MTS terhadap pendidikan multikultural keagamaan guna penanggulangan radikalisme secara dini”

Penulis : E. Bahruddin, Abdu Rahmat Rosyadi, Edy. dari Pascasarjana Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

Tempat penelitian : Penelitian tersebut di lakukan di MTSn Nurul Ikhsan Cibinong Bogor.

Hasil penelitian : Dengan menggunakan Metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di nyatakan bahwa persepsi siswa Mts berjalan dengan baik dengan hasil survey 86,74%

3. Judul : “Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Siswa Sma Negeri Di Kota Surakarta”

Penulis : Agatha Kristi Prodi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta
email : agathakristi@student.uns.ac.id

Hasil penelitian : bahwa karakter peserta didik mampu mengamalkan ajaran dan agama yang dianutnya dan menghargai keberagaman agama suku budaya dan ras, mematuhi aturan yang berlaku, memiliki kemampuan menganalisis dalam memecahkan permasalahan , memiliki sifat demokratis dan menghargai perbedaan, mengaktualisasikan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

4. Judul : “Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat”

Penulis : Saihu dan Marsiti dari Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta.

Hasil penelitian : Peneliti menggunakan metode phenomenology. Merupakan salah satu penelitian dalam studi kualitatif hasil dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa pendidikan karakter dalam menangkal radikalisme di SMANegeri3Depok dilakukan dengan cara: (1) melalui kurikulum formal, melalui pembelajaran pada mata pelajaran PAI, Bimbingan Konseling, dan mata pelajaran lainnya, (2) melalui kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yaitu kegiatan pembiasaan dalam penanaman nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan penangkal radikalisme bagi kehidupan sehari-hari peserta didik di lingkungan sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Upaya mencegah radikalisme di SMA Negeri 3 Depok dilakukan dengan cara penanaman: (1) Imaniyah (keimanan dan ketakwaan), (2) Ilmiah (keilmuan yang mumpuni), dan (3) Amaliyah (perilaku/perbuatan yang sesuai dengan keimanan dan ketakwaan serta sesuai dengan keilmuan yang mumpuni). Ketiga cara ini diterapkan pada peserta didik secara intensif, sehingga diharapkan tercapainya tujuan pendidikan karakter dalam menangkal radikalisme di SMA Negeri 3 Depok.

5. Judul : “Strategi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme Di Era Globalisasi”

Penulis : Lisa Retnasari dari Universitas Ahmad Dahlan Email : lisa.retnasari@pgsd.uad.ac.id

Hasil penelitian : Penelitian ini dilakukan SD Tumbuh 2 Yogyakarta dengan subjek penelitian kepala sekolah dan edukator sejumlah 10 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi pendidikan multikultur pada era globalisasi dapat ditekan melalui program kurikuler PPKn di sekolah dasar untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi, menyatukan perbedaan, menghargai hak asasi manusia dalam wadah “Bhineka Tunggal Ika”. Dikolaborasi dengan metode penyampaian materi yang interaktif, disesuaikan dengan generasi.

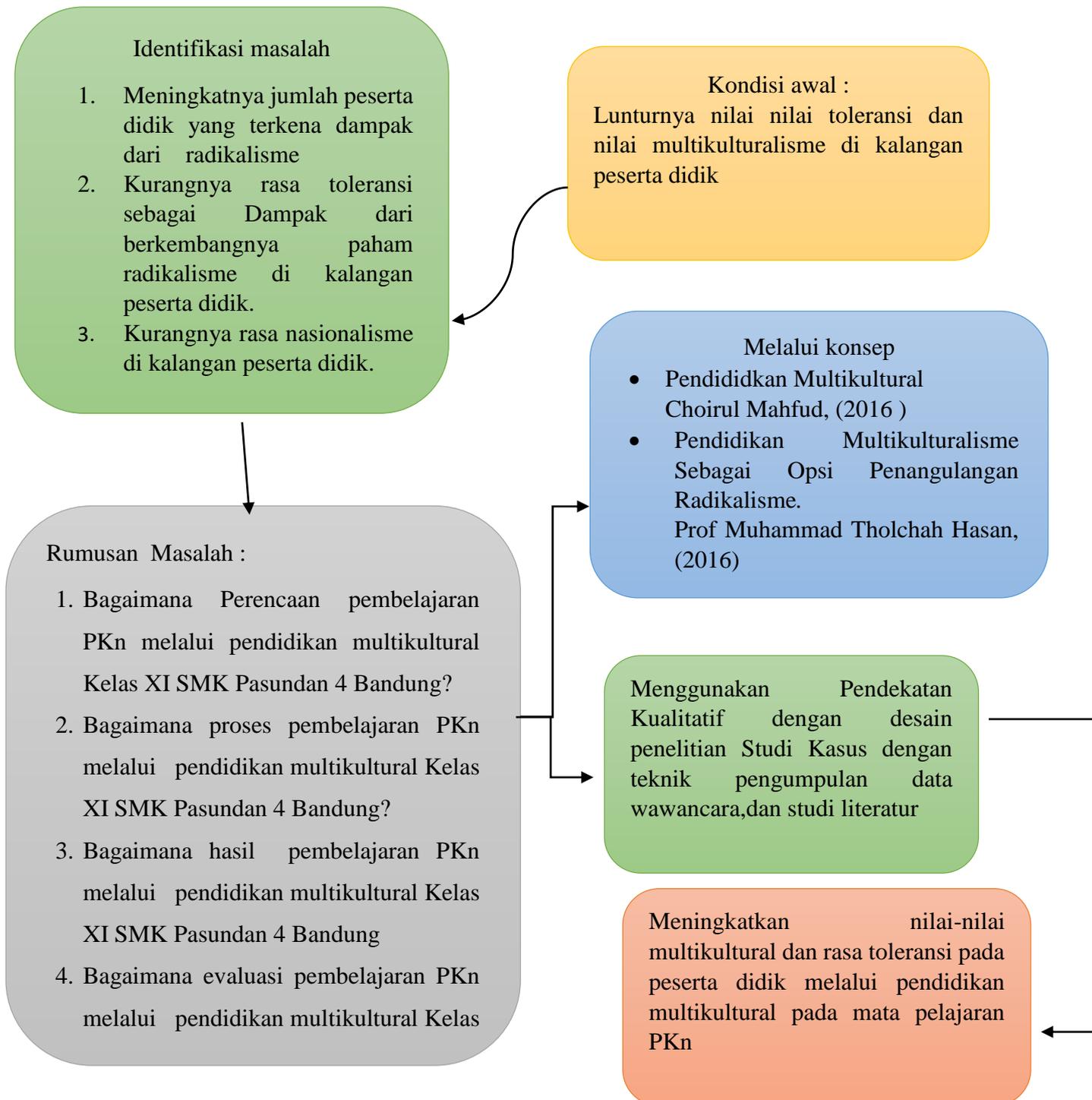
Kemudian membangun paradigma sekolah inklusif dengan mengembangkan kurikulum syarat dengan nilai yang mengedepankan penghargaan terhadap menghargai Hak Asasi Manusia

C. Kerangka Pemikiran

Saat ini penerapan nilai nilai multikultural dan toleransi di kalangan peserta didik sudah mulai luntur karena disebabkan masuknya paham radikalisme karena arus globalisasi yang semakin cepat dan menggerus generasi bangsa ini oleh karena itulah penulis melakukan penelitian mengenai “Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme Di Kalangan Peserta Didik”

Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: kurangnya rasa toleransi di antara peserta didik dan kurangnya rasa menghormati kepada guru . hal ini di latarbelakangi karena pemuda dan generasi muda saat ini bersifat individualis. dan lsenang dengan budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan norma norma pancasila. Hal ini disebabkan dengan kurangnya pemahaman akan pendidikan multicultural. Lalu setelah hasil identifikasi masalah peneliti membuat dan merumuskan masalah kedalam beberapa pembahasan dengan di damping dengan kajian teori yang telah sesuai dan mengacu pada buku Pendidikan multikultural (Mahfud.C, 2016) dan beberapa sumber yang sudah di pilih .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus hal ini di anggap karena peneliti merasa dengan desain dan pendekatan tersebut maka penelitian akan di lakukn sevara optimal dalam menjalankan wawancara dan studi literature. Agar hasil penelitian dapat tercapai seperti apa yang di inginkan. pencegahan dampak paham radikalisme pada peserta didik melalui pendidikan multikultural pada mata pelajaran PPkn



Gambar 2.1 Karangka pemikiran